

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021
(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH:

DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021

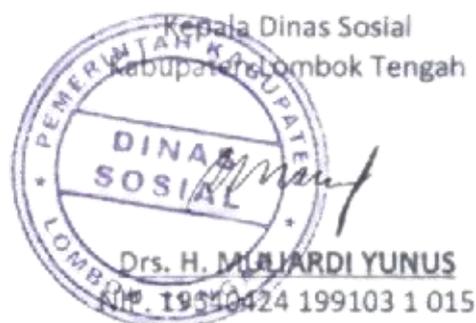
KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2021, disusun buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 yang sebelumnya di sebut LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sepanjang tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 berisi tentang gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja tahun I (PERTAMA) dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi & Misi, serta tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Lombok Tengah pada khususnya.

Praya, Januari 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1 - 5
I.1. Tugas, Fungsi SKPD.....	2-3
I.2. Data Kepegawaian	2-3
I.3. Struktur Organisasi SKPD	4 - 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6 - 12
II.1. Rencana Strategis SKPD.....	6 - 7
II.2. Rencana Kinerja Tahunan	8
II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	9
II.4. Perjanjian Kinerja SKPD Tahunan	10-12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13 - 44
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2021	14
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran SKPD Tahun 2021.....	14
III.2.1. Sasaran 1	14
III.2.2. Sasaran 2	14
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis SKPD Tahun 2021	41
III.4. Akuntabilitas Keuangan	42-44
BAB IV PENUTUP	45-46
LAMPIRAN	
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA;(IKU, CASCADING)	
DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SKPD TAHUN 2021	
TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menuju terwujudnya *Good Governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian Tujuan dan Sasaran-sasaran strategis Tahun 2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Strategis, dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (Outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing Indikator tiap Sasaran Strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase Cakupan PMKS	80,27	91,57	%
Optimalisasi Penanganan Bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana	100	100	%

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Tugas, Fungsi SKPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 77 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial.

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Sosial merupakan unsur yang menangani urusan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, memiliki peranan penting karena menyangkut penanganan kebutuhan dasar masyarakat yang menyanggah permasalahan kesejahteraan sosial .

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah . Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang sosial

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Teknis dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang sosial;
- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2. Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 26 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

REGISTER PEGAWAI DINAS SOSIAL Keadaan : 31 Desember 2021

NO	NAMA	L/P	GOL	ESE LO N	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT PIM YANG TELAH DIKUTI	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Drs. H.Muliardi Yunus	L	IV/c	IIb	Kepala Dinas	Sarjana(S1)	PIM II	
2.	Ahmad Wildan, A.Ks.	L	IV/a	IIIa	Sekretaris Dinas	Sarjana(S1)	PIM IV	
3.	H.Lalu Indra Jaya Sakti, S.Si.	L	III/d	IIIb	Kabid Rehsos	Sarjana(S1)	PIM IV	
4.	Sirajuddin, A.Md.Gz.	L	III/d	IIIb	Kabid Linjamsos	Sarjana Muda	PIM IV	
5.	Dede Tsabitul MHM,S.Sos.	L	III/d	IIIb	Kabid Dayasos	Sarjana(S1)	-	
6.	Lale Mustianah, S.Hi.	P	III/d	IVa	Kasubbag Umpeg &Keu	Sarjana(S1)	-	Sekretariat
7.	Musyahrain, S.Sos.	L	III/d		JF Perencana Ahli Muda	Sarjana(S1)	PIM IV	Sekretariat
8.	Lalu Ahmad Juliadi, S.Sos.	L	III/d		JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	Sarjana(S1)	PIM IV	Bidang Linjamsos
9.	Lalu Putrangsa, S.Sos.	L	III/d		JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	Sarjana(S1)	-	Bidang Linjamsos
10.	Karyadi, S.Sos.	L	III/d		JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	Sarjana(S1)	-	Bidang Dayasos
11.	Titin Prihatin	P	III/d		JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	SLTA	-	Bidang Dayasos
12.	Lalu Ahsanul Haq, SH.	L	III/d		JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	Sarjana(S1)	PIM IV	Bidang Rehsos
13.	Baiq Nunung Izzati, MPSSp	P	III/c		JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	Megister(S2)	-	Bidang Rehsos
14.	Seftia Nurul Baiti, S.Psi.	P	III/c		JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	Sarjana(S1)	-	Bidang Rehsos
15.	Drs. Ilham Afandi, M.Si.	L	IV/a		Analisis Pelayanan Sosial	Megister(S2)	PIM IV	Bidang Linjamsos

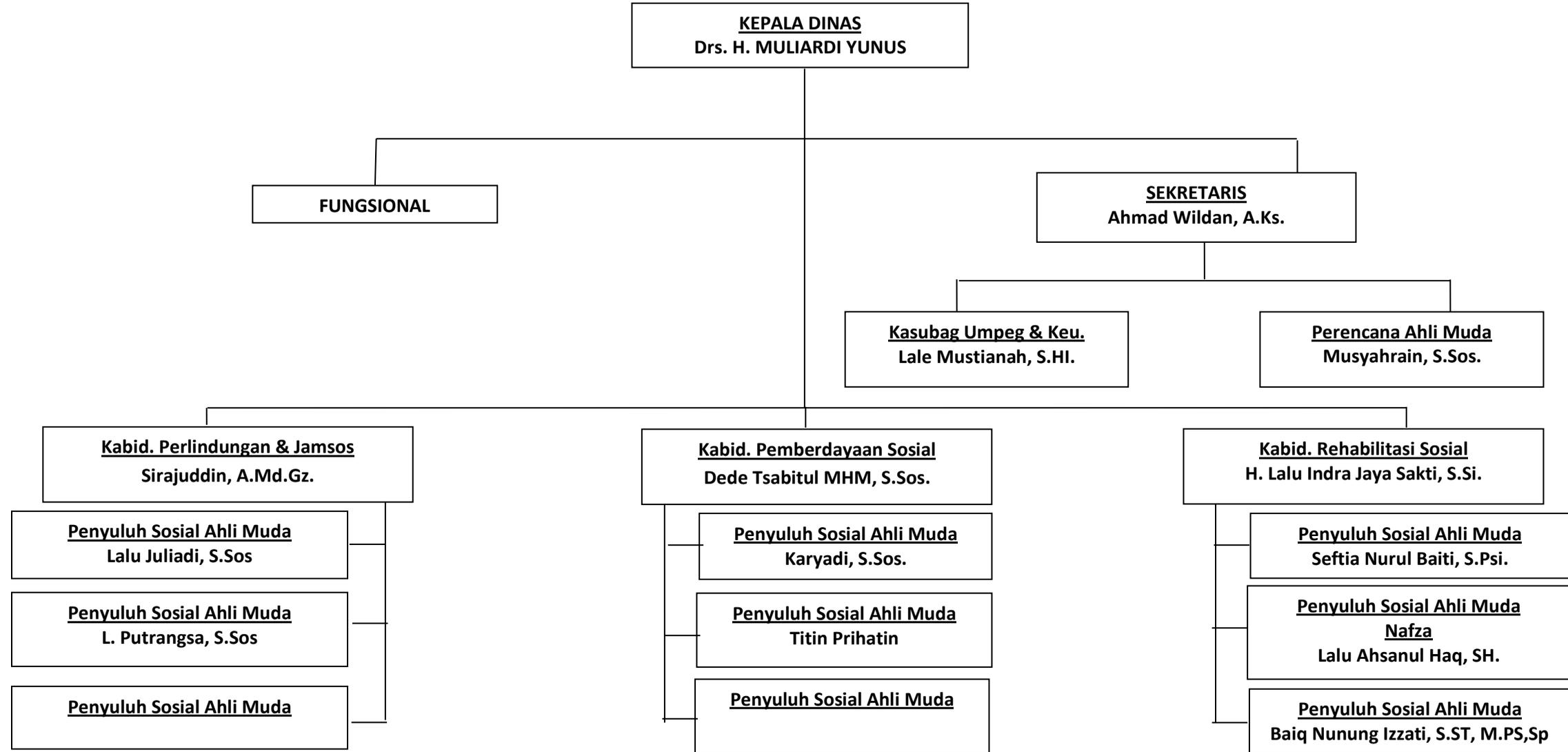
16.	Palupi Etika Rini, A.Md.	P	III/b		Bendahara	Diploma	-	Sekretariat
17.	Busairi, SH.	L	III/b		Pengelola Kepegawaian	Sarjana(S1)	-	Sekretariat
18.	Lale Ulfa Chaerullina	P	II/d		Pengelola Data Bantuan Sosial	SLTA	-	Bidang Linjamsos
19.	Pajar	L	II/d		Pengadministrasi Umum	SLTA	-	Sekretariat
20.	Lalu Kasiran	L	II/d		Pengadministrasi Persuratan	SLTA	-	Sekretariat
21.	Lalu Erwin Juliadi	L	II/a		Sopir	SLTA	-	Sekretariat
22.	Akhmad Subayan Nazri, S.Pd.	L	III/a		Pengelola Pemanfaatan BMD	Sarjana(S1)	-	Sekretariat
23.	Baiq Indria Purnawati, ST.	P	III/b		Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	Sarjana(S1)	-	Bidang Dayasos
24.	Risman Taufik	L	II/d		Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	SLTA	-	Bidang Dayasos
25.	Lalu Nikman Batin	L	III/a		Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Sarjana(S1)	-	Bidang Rehsos
26.	Meliyanti, A.Md.	P	III/a		Pengelola Bahan Perencanaan	Diploma	-	Sekretariat

Berdasarkan tabel diatas maka SDM/personil pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sangat minim yaitu hanya 26 orang termasuk yang keadaan sakit 2 orang. Minimnya personil Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dan kurangnya tenaga ahli bidang kesejahteraan sosial (profesi), serta kurangnya SDM yang memiliki kemampuan IT, sehingga harus bekerja secara optimal untuk menutupi kekurangan personil tersebut

1.3 Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah No 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis SKPD

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Merawat ahlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Mencapai sumber daya manusia yang cerdas, mandiri dan unggul;
- 3) Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih;
- 4) Pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas;
- 5) Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, mendukung visi dan misi RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu **” Pembangunan ekonomi yang berkeselimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas”**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten *Lombok Tengah*.

Renstra Dinas Sosial 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten *Lombok Tengah*

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021 S.D. 2022**

Instansi : Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase Cakupan PMKS	Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan PMKS	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
2. Cakupan Penanganan Bencana;	Optimalisasi Penanganan Bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana	Koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana	Program Penanganan Bencana	

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan isu utama permasalahan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah

Berdasarkan uraian diatas maka **Tujuan** yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Cakupan Penanganan Bencana;

:

II.2. Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. **Sasaran** yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah sesuai tabel di bawah ini :

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH(SKPD)

SKPD : DINAS SOSIAL
Tahun : 2021

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1. Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase Cakupan PMKS	80,27 %
2. Optimalisasi Penanganan Bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana	100 %

II.3. Indikator Kinerja Utama(IKU) SKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD DINAS SOSIAL

NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI SAAT INI (2015)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
							1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Meningkatnya kualitas PMKS	Persentase Graduasi Mandiri	Jumlah Graduasi Mandiri/Jumlah PMKS yang ditangani * 100	Dinas Sosial	Kabid Linjamsos, Kabid Rehsos dan Kabid Dayasos	1%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
	1. Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase Cakupan PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani/Jumlah PMKS *100	Dinas Sosial	Kabid Linjamsos, Kabid Rehsos dan Kabid Dayasos	70%	80,27 %	80,27 %	80,27 %	80,27 %	80,27 %	80,27%
2.	Cakupan Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	Jumlah Penanganan Bencana yang dilaksanakan selama 1 tahun	Dinas Sosial	Kabid Linjamsos	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
	1. Optimalisasi Penanganan Bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang ditangani selama 1 tahun	Dinas Sosial	Kabid Linjamsos	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%

II.4. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH.**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP.**

Jabatan : **BUPATI LOMBOK TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 9 Januari 2021

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

BAIQ SRIHASTUTI HANDAYANI,SH.

NIP.19640804 198609 2 003

Pihak Kedua,

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS SOSIAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase Cakupan PMKS	80,27%
2.	Optimalisasi Penanganan Bencana	Cakupan penanganan korban bencana	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
(2)	(3)	(4)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.229.108.265	Sumber APBD, Kegiatan pada Dinas Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial	35.197.684	Sumber APBD, Kegiatan pada Dinas Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial	1.074.392.442	Sumber APBD, Kegiatan pada Dinas Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	802.016.938	Sumber APBD, Kegiatan pada Dinas Sosial
5. Program Penanganan Bencana	384.786.568	Sumber APBD, Kegiatan pada Dinas Sosial
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	27.964.337	Sumber APBD, Kegiatan pada Dinas Sosial
Jumlah	5.553.466.234	

Pihak Kedua,
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP.

Praya, 9 Januari 2021
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAIQ SRIHASTUTI HANDAYANI,SH.

NIP.19640804 198609 2 003

RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI

OPD : DINAS SOSIAL

PERIODE PENILAIAN : JANUARI S.D. DESEMBER TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Baiq Srihastuti Handayani, SH.	NAMA	Lalu Firman Wijaya, ST, MT.
NIP	19640804 198609 2 003	NIP	19700504 200003 1 007
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tk. I (IV/b)
JABATAN	Kepala Dinas	JABATAN	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
INSTANSI	Dinas Sosial Kab.Loteng	INSTANSI	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah
NO	RENCANA KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase PMKS yang terlayani kebutuhan dasarnya	80,27%
2.	Optimalisasi Penanganan Bencana	Persentase penanganan korban bencana pada saat dan pasca bencana	100 %
3.	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	100 %
B. KINERJA TAMBAHAN			

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAIQ SRIHASTUTI HANDAYANI,SH.
NIP.19640804 198609 2 003

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2021

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Untuk menilai keberhasilan P encapaian Indikator Kinerja Sasaran digunakan Sasaran Skala Ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

1.1 Persentase Cakupan PMKS

Persentase pencapaian	=	91,57 %	X 100%	Nilai = 114,08 % Sangat Baik
Rencana tingkat pencapaian		80,27 %		

1.2. Cakupan Penanganan Korban Bencana

Persentase pencapaian	=	100 %	X 100%	Nilai = 100% Baik
Rencana tingkat pencapaian		100 %		

III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran SKPD Tahun 2021

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. SASARAN 1 : Meningkatnya PMKS yang ditangani

Sasaran No.1 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:
Persentase Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)

b. SASARAN 2 : Optimalisasi Penanganan Bencana

Sasaran No.2 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:
Cakupan Penanganan Korban Bencana

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 dan 2 Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir Renstra 2026	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Cakupan PMKS	%	80,27	91,57	114,08	139,76	80,27	Dinsos
2.	Cakupan Penanganan Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	Dinsos
RATA-RATA					107,04 %	119,88%	KRITERIA Tahun 2021 Sangat Baik	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya PMKS yang ditangani dan Optimalisasi Penanganan Bencana dengan Indikator Persentase Cakupan PMKS dan Cakupan Penanganan Korban Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menghasilkan Capaian Kinerja 107,04 % dengan Kriteria Sangat Baik.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

a) **Indikator ; Persentase Graduasi Mandiri**

Target Capaian Indikator Tujuan 1 : Persentase Graduasi Mandiri PMKS tahun 2021 sebesar 0.01 %. Dengan realisasi capaian tahun 2021 sebesar 0,04 %

Penjelasan Indikator Tujuan nomor 1 (satu), yaitu : “Persentase Graduasi Mandiri” adalah ;

1. Pengertian Indikator dan Manfaat indicator

Pengertian dari indicator tujuan No. 1 Graduasi Mandiri adalah berakhirnya kepesertaan PMKS dikarenakan kondisi KPM sudah mapan kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan dasar serta dapat menjalankan fungsi sosialnya. Dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan indicator Tujuan No. 1 Graduasi Mandiri yaitu KPM yang memperoleh manfaat dari program bantuan Tahun 2021. Adapun manfaat dari indicator tersebut yaitu untuk mengetahui persentase KPM Graduasi Mandiri yang di lakukan terhadap PMKS sesuai RPJMD Tahun 2021 yang telah di tetapkan

2. Metode/ Teknik/Rumus untuk menghitung /mengukur Pencapaian Indicator

Adapun metode /teknik yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menghitung jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2021 yang baik yang sumber dana APBN, APBD I dan APBD II. Kemudian dibagi dengan jumlah total data PMKS yang ada berdasarkan hasil verifikasi pendataan PMKS Tahun 2021.

3. Sumber data / referensi yang digunakan untuk menghitung pencapaian indicator yaitu dengan menggunakan sumber data hasil pelaksanaan program kegiatan terkait penanganan PMKS yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

b). **Indikator ; Persentase Cakupan PMKS**

Target Capaian Indikator Sasaran 1 : Persentase Cakupan PMKS sebesar 80, 27 % pada tahun 2021 sedangkan Capaian Indikator Persentase Cakupan PMKS Tahun 2021 sebesar 91,57 %

Penjelasan Indikator Sasaran nomor 1 (satu), yaitu : “**Persentase Cakupan PMKS**” adalah ;

1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator

Pengertian dari Indikator Sasaran No. 1 , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,kesulitan atau gangguan, tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan PMKS terdapat 26 jenis PMKS.

Dari pengeritian PMKS diatas, yang dimaksud dengan indikator Sasaran No 1. : ‘ Persentase Cakupan PMKS’ yaitu Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan pada Tahun 2021 di bandingkan dengan total jumlah data PMKS hasil verifikasi Data PMKS Tahun 2021. Adapun manfaat dari indicator tersebut yaitu untuk mengetahui persentase Pembinaan/Penanganan yang dilakukan terhadap PMKS seusui dengan target RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

2. Metode/ Teknik/Rumus untuk menghitung /mengukur Pencapaian Indicator
Adapun metode /teknik yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menghitung jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2021 yang baik yang sumber dana APBN, APBD I dan APBD II. Kemudian dibagi dengan jumlah total data PMKS yang ada berdasarkan hasil verifikasi pendataan PMKS Tahun 2021.
3. Sumber Data /referensi yang digunakan untuk menghitung /mengukur pencapaian indikator
Sumber data / referensi yang digunakan untuk menghitung pencapaian indikator yaitu dengan menggunakan sumber data hasil pelaksanaan program kegiatan terkait penanganan PMKS yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.
4. Program Kegiatan yang dilaksanakan
Adapun Program Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan yaitu :
 - **Program Rehabilitasi Sosial :**
 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial
 - 1.1.Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
 - 1.2.Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - 1.3.Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 2.Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial
 - 2.1. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
 - 2.3.Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota
 - **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
 1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota
 - 1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - 1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - **Program Pemberdayaan Sosial**
 1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Dokumentasi / Foto – foto Kegiatan :



Bimtek Kelompok Usaha Bersama (KUBE)





Pemberian Paket Bantuan Modal Usaha Tenun Kelompok Usaha Bersama (KUBe)







Bimtek Operator SIKS-NG (SLRT Operator)



Bantuan Assistensi bagi Lanjut Usia, Anak Terlantar dan Penyandang Disabilitas (sembako)



Penjangkauan PMKS



Atensi Anak 2021



Penyerahan Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas





Bimtek Wira Usaha Wanita Rawan Sosial Ekonomi(WRSE)



Pemberian Modal Usaha Bakulan Sembako bagi WRSE



Kegiatan Rapat-Rapat SDM PKH



Kegiatan Validasi PKH



Kegiatan Pemutakhiran PKH



Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Keluarga (P2K2/FDS)



Kegiatan Pencairan PKH



Kegiatan Graduasi Mandiri PKH



Kegiatan Monitoring PKH

6. Analisis / Perbandingan Capaian target indikator dengan Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Cakupan PMKS merupakan target pencapaian sasaran pertama dari target RPJMD tahun 2021-2026 untuk tahun 2021 ini sebesar 80,27 % dimana pencapaian sasaran mencapai 91,57 %.

7. Pendukung /penghambat pencapaian target indikator pada Tahun 2021

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian Indikator yaitu peran aktif SKPD dalam berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait upaya penanganan permasalahan permasalahan sosial yang ada di Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Sosial mendapatkan berbagai Program Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS yang Sumber Pendanaanya berasal dari APBN, APBD I maupun APBD II.

b) Indikator Tujuan 2 : Persentase Penanganan Bencana

Capaian Indikator Persentase Penanganan Bencana Tahun 2021 sebesar : 100 %

Penjelasan Indikator sasaran Nomor 2 (dua), yaitu :“ **Cakupan Penanganan Korban Bencana**” adalah

1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator
Persentase penanganan bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (pasal 1 ayat 6 PP No. 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana)
2. Metode/teknik/rumus untuk mengukur pencapaian Indikator
Metode yang digunakan yaitu dengan cara melakukan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menghitung jumlah kejadian bencana selama tahun 2021.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan untuk menghitung/mengukur pencapaian indicator adalah dengan menggunakan sumber data laporan kejadian bencana selama tahun 2021 pada bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

c) Indikator sasaran 2 : Cakupan Penanganan Korban Bencana

Capaian Indikator Cakupan Penanganan Korban Bencana Tahun 2021 sebesar : 100 %

Penjelasan Indikator Cakupan penanganan korban bencana

1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator
Cakupan Penanganan Korban Bencana adalah Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yg sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
2. Metode/teknik/rumus untuk mengukur pencapaian Indikator
Metode yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menghitung jumlah data korban bencana yang diberikan bidang perlindungan sosial pada tahun 2021 baik yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN kemudian di bagi dengan jumlah data korban bencana pada tahun 2021
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan yaitu Sumber data hasil rekapitulasi data korban bencana selama tahun 2021 pada bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

4. Program Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1. Program Penanganan Bencana

4.1.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Kabupaten/Kota

4.1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

4.1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap

Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

4.1.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan

Taruna Siaga Bencana

5. Dokumentasi / Foto - foto Kegiatan :



Distribusi Bantuan Bencana



Penyerahan Bantuan Korban Bencana





Kegiatan Bakti Sosial TAGANA





Kegiatan TAGANA bersama BASARNAS



TAGANA GO TO SCHOOL (TMS)



Pendistribusian air bersih kepada masyarakat

6. Analisis / Perbandingan Capaian target indikator dengan Tahun sebelumnya
Indikator Persentase Cakupan PMKS merupakan target pencapaian sasaran pertama dari target RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 100 % dimana pencapaian sasaran mencapai 100 %.
7. Pendukung /penghambat pencapaian target indikator pada Tahun 2021

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian Indikator yaitu peran serta semua stake holder/pemangku kepentingan dalam penanganan bencana baik dari segi koordinasi maupun dalam ketersediaan logistic bencana.

III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis SKPD Tahun 2021

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel
Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
SKPD Dinas Sosial Tahun 2021

TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN		KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2015)	
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS	1.	Meningkatnya PMKS yang ditangani	114,08 %	Sangat Baik	400 %	Sangat Baik	Baik
2.	Cakupan Penanganan Bencana	2.	Optimalisasi Penanganan Bencana	100 %	Baik	100 %	Baik	Baik
Rata – rata Total				107,04 %	Sangat baik	250 %	Sangat Baik	Baik

III.4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari Aspek Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi dari pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan SKPD

No	Program dan Kegiatan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Per Sen Tase (%)	Unit Kerja Yg melaksakan Program/Kegiatan
			Belanja Pegawai	Belanja Barang Dan Jasa	Belanja Modal				
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	-	-	16.463.753	-	16.463.753	16.314.400	99,09	Sekretariat
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	2.805.562.950	10.290.000	7.069.042	-	2.822.921.992	2.771.526.288	98,18	Sekretariat
3.	Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	-	-	76.981.634	-	76.981.634	76.106.200	98,86	Sekretariat
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	-	-	117.987.600	-	117.987.600	84.947.699	72,00	Sekretariat
5.	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintahan daerah	-	-	194.753.286	-	194.753.286	173.267.140	88,97	Sekretariat
II. Program Pemberdayaan Sosial									
1.	Kegiatan Pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.197.684	-	35.197.684	35.174.150	99,93	Bidang Dayasos

III. Program Rehabilitasi Sosial									
1.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, AT, LUT, serta Gepeng di luar Panti	-	-	376.025.389	-	376.025.389	374.118.600	99,49	Bidang Rehsos
2.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	-	-	698.367.053	-	698.367.053	689.326.000	98,71	Bidang Rehsos
IV. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial									
1.	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	-	-	802.016.938	-	802.016.938	767.590.800	95,71	Bidang Linjamsos dan Bidang Dayasc
V. Program Penanganan Bencana									
1.	Kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	-	-	347.437.100	-	347.437.100	346.739.600	99,80	Bidang Linjamsos
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat Terhadap kesiapsiagaan Bencana kabupaten/kota	-	-	37.349.468	-	37.349.468	28.541.640	76,42	Bidang Linjamsos
VI. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan									
1.	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			27.964.337		27.964.337	25.946.750	92,79	Bidang Dayasos
JUMLAH		2.805.562.950	10.290.000	2.737.613.284	-	5.553.466.234	5.389.599.267	97,05	Dinsos

Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Sosial 2021 sebesar 97,05 % dari Anggaran Belanja Pegawai(Gaji dan Tunjangan ASN) 98,17 % dan Belanja Publik/Teknis(Belanja Operasi) sebesar 95,90 %. Dari Realisasi Anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan Anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 97%.

Berdasarkan Data dalam Tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2021 untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (Good Governance).

Secara umum pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan baik dari sisi SDM maupun Teknis pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan baik dalam keselarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra, Dokumen Renja dan DPA Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Target Kinerja dapat dicapai sesuai dengan harapan.

IV.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut

1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang sistem penentuan Indikator Pelaporan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif kepada Aparatur.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan SDM Aparatur Dinas Sosial kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial sehingga dapat menghasilkan program yang tepat, terarah dan berkualitas.

Demikian beberapa hal yang perlu disarankan agar kualitas penerapan SAKIP dalam kerangka penerapan good governance meningkat dan mampu memenuhi tuntutan publik akan kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Praya, Januari 2021



LAMPIRAN LKj-IP SKPD TERDIRI DARI :

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
2. DOKUMEN CASCADING
3. DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN
4. TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021



DISUSUN OLEH:

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

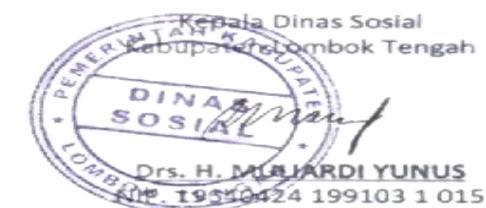
TAHUN 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021 – 2026**

SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Kondisi Saat Ini (2020)	Target Capaian					
									2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					Persentase Mandiri Graduasi	Jumlah Graduasi Mandiri/Jumlah PMKS yang ditangani * 100	1 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %
		1.	Meningkatnya PMKS yang ditangani	Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan (PMKS)	Meningkatkan Cakupan Layanan PMKS	Persentase Cakupan PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani/Jumlah PMKS *100	70 %	80,27 %	80,27 %	80,27 %	80,27 %	80,27 %	80,27 %
2	Cakupan Penanganan Bencana					Persentase Penanganan Bencana	Jumlah Penanganan Bencana yang dilaksanakan selama 1 tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2.	Optimalisasi Penanganan Bencana	Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang ditangani selama 1 tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Praya, Januari 2021

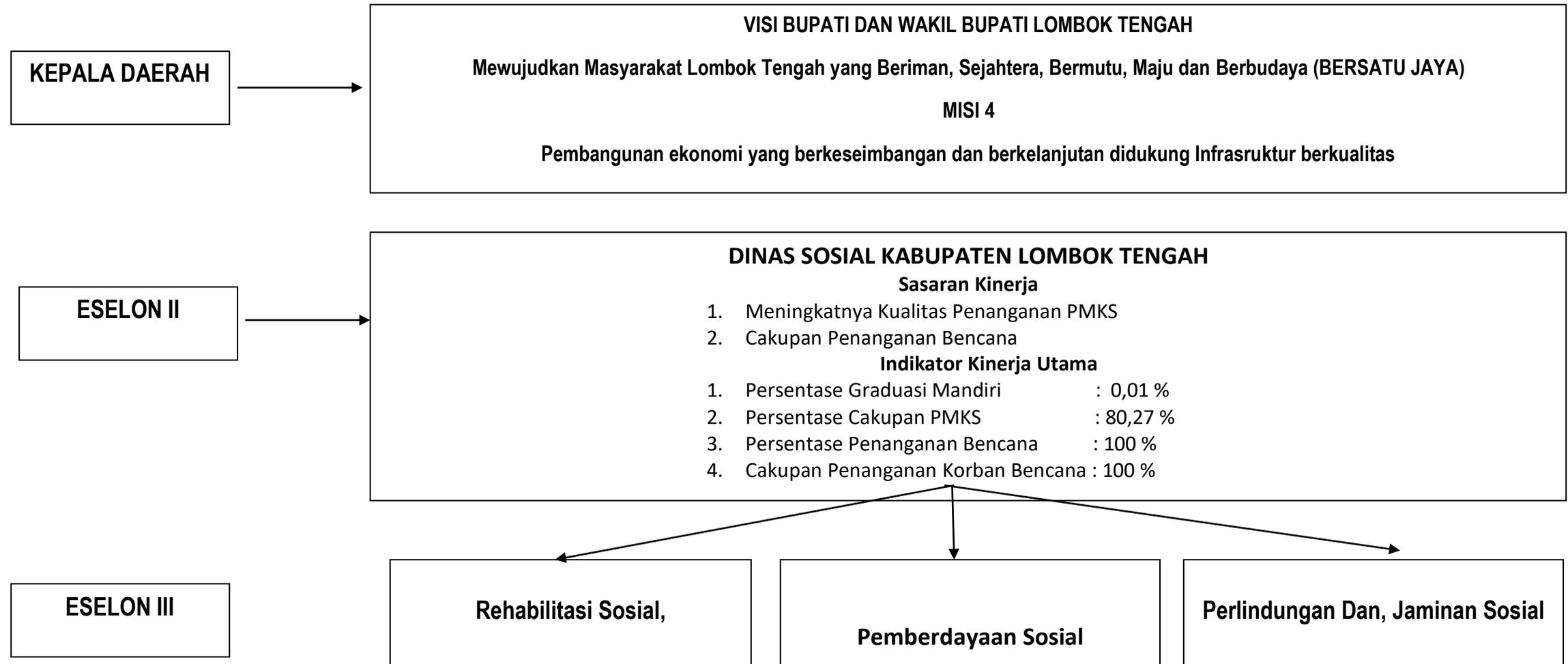


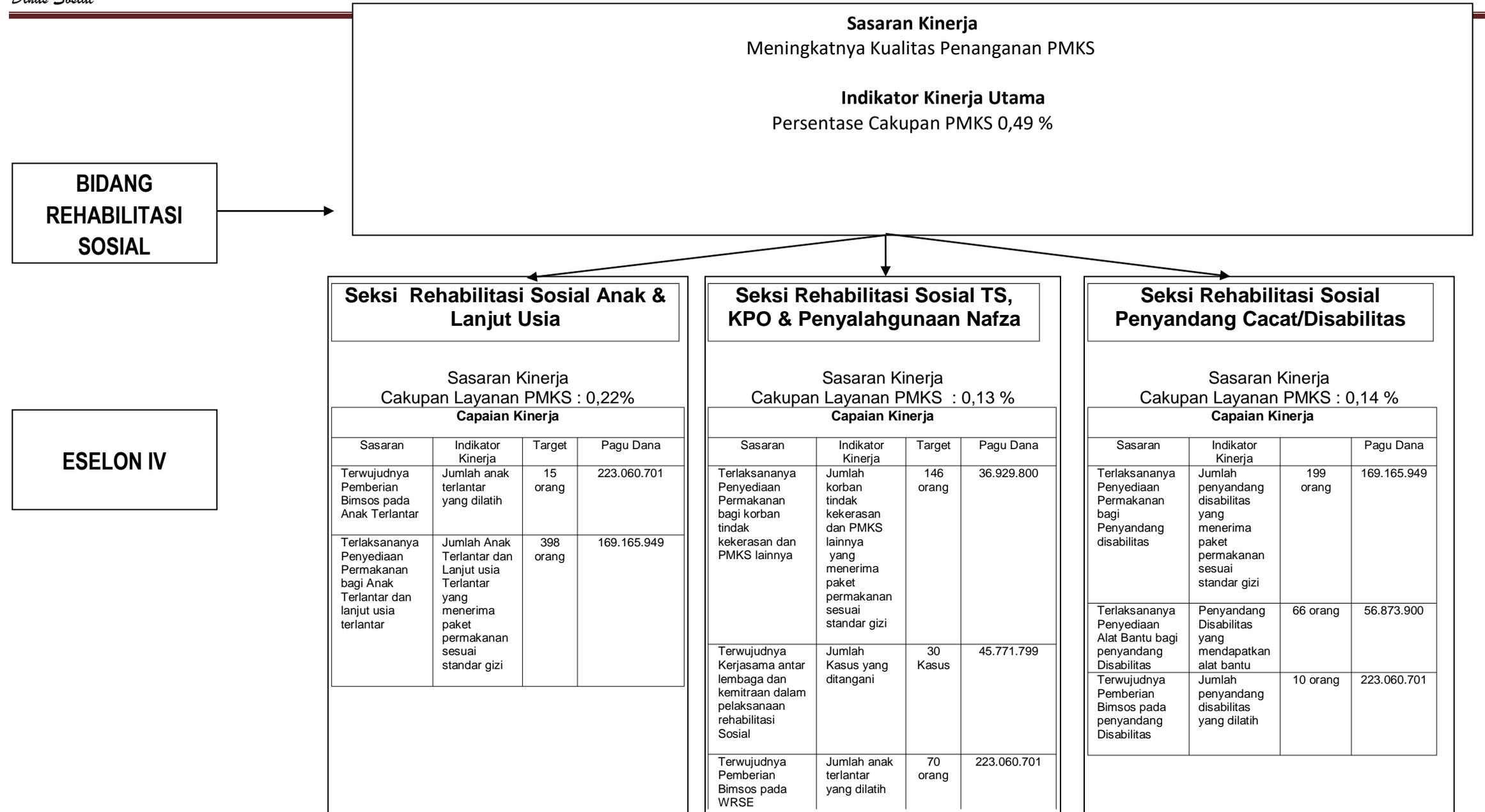
CASCADING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

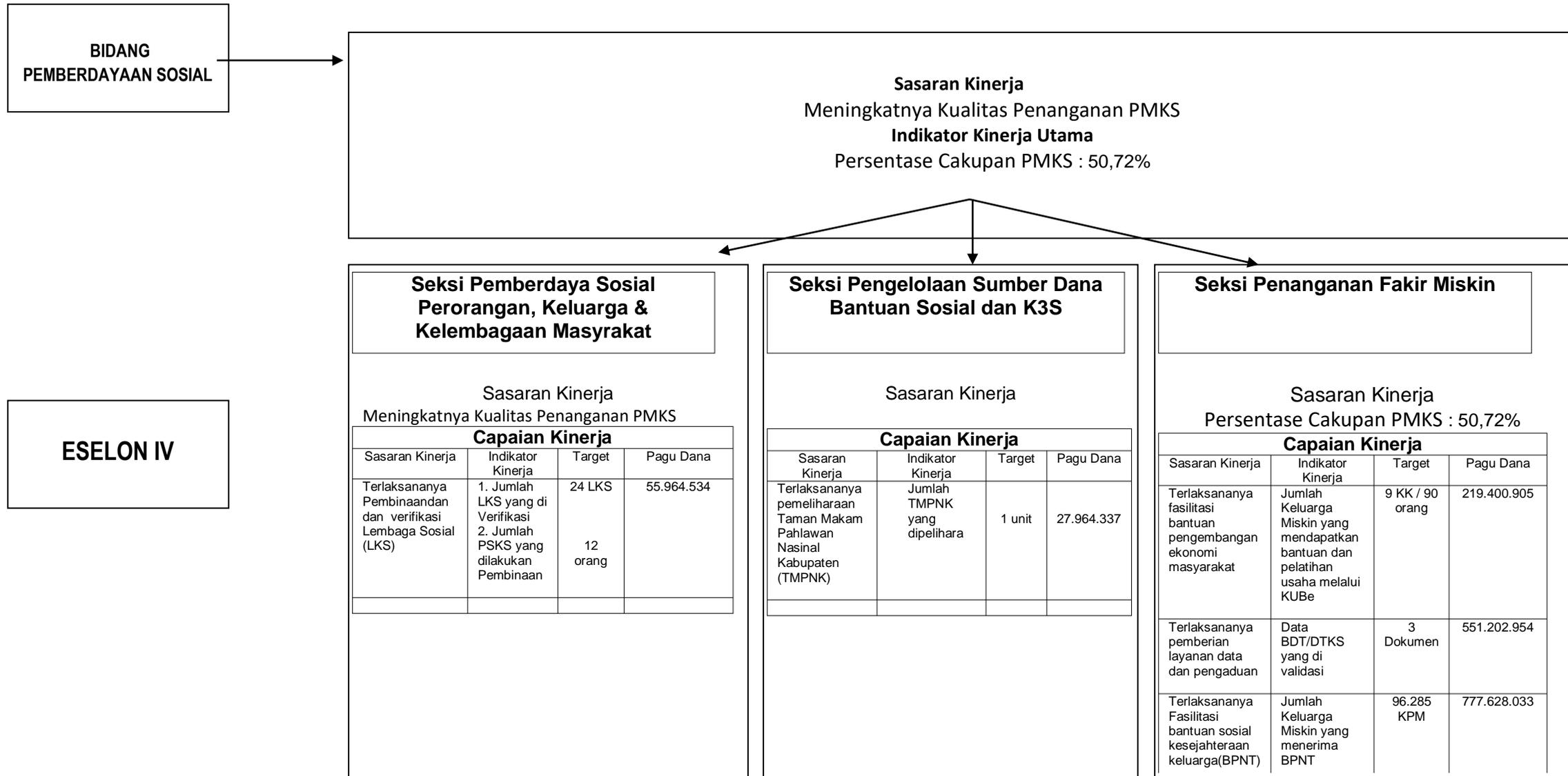


DISUSUN OLEH:
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021

CASCADING DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021







**BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**

Sasaran Kinerja

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS
2. Cakupan Penanganan Bencana

Indikator Kinerja Utama

1. Persentase Cakupan PMKS : 29,06 %
2. Cakupan Penanganan Korban Bencana : 100 %

ESELON IV

**Seksi Perlindungan Sosial
Keluarga**

Sasaran Kinerja

Persentase Cakupan PMKS : 29,06 %

Capaian Kinerja			
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pagu Dana
Terlaksananya Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga(PKH)	Jumlah Keluarga yang menerima bantuan PKH	55,228 KPM	777.628.033

**Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Bencana Sosial**

Sasaran Kinerja

Cakupan Penanganan Korban Bencana :100 %

Capaian Kinerja			
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pagu Dana
Terlaksananya Penyediaan makanan bagi Korban bencana alam dan Bencana Sosial	Tersedianya buffer stock pangan untuk korban bencana	1 Paket	347.437.100
Terlaksananya koordinasi, pemantapan Tagana, dan rakor tenaga pelopor perdamaian dan Pembina konflik dalam penanganan bencana	Jumlah Pemantapan Tagana, Hut Tagana, Rakor Tenaga Pelopor Perdamaian dan Pembina Konflik, dan rapat evaluasi tim tanggap cepat darurat	1 Kali, 1 Kali, 4 Kali 4 Kali	59.470.868

**Seksi Penelolaan Data dan
Informasi**

Sasaran Kinerja

Cakupan Layanan PMKS :

Capaian Kinerja			
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pagu Dana
-	-	-	-

3. DATA PRESTASI / PERHAGAAN TAHUN 2021

NO	JENIS PRESTASI	KETERANGAN
-	-	-

4. HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD TAHUN 2021

No.	Sasaran RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Renstra SKPD	Indikator Kinerja Utama(IKU) SKPD	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	Program/Kegiatan SKPD Tahun	AnggaranProgram/ KegiatanTahun 2021
1.	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial	Percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja	Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase Graduasi Mandiri	0,01 %	Program Rehabilitasi Sosial	1.074.392.442
				Persentase Cakupan PMKS	80,27 %	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, AT, LUT, serta Gepeng di luar Panti	376.025.389
						Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	698.367.053
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	802.016.938
						Kegiatan Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	802.016.938
2.	Meningkatnya ketahanan bencana	Stabilitas keamanan dan ketertiban	Optimalisasi Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	100 %	Program Penanganan Bencana	384.786.568
				Cakupan Penanganan Korban Bencana	100 %	Kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	347.437.100
						Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat Terhadap kesiapsiagaan Bencana kabupaten/kota	37.349.468

Praya, Januari 2022



